

SOLUSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19

Tiara Fazreen¹ Mas Dadang Enjat Munajat²

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹tiara@mail.unpad.ac.id ; ²mdenjat@gmail.com

ABSTRACT

The current situation that threatens Indonesia is caused by the spread of the Covid-19 virus. Everyday active cases continue to increase and make Indonesia experiencing a domino effect. Limited health facilities, learning activities, restrictions on social and economic activities, and others. Restrictions on the social and economic activities of the community by the government raise new problems, namely increasing unemployment and the appearance of new groups of poor people. For this reason, the government is trying to optimize the provision of social assistance funds for affected communities. Therefore, by utilizing blockchain technology, it is expected to optimize the distribution of Covid-19 social assistance funds. The method used is a qualitative approach based on previous research. The results of this study are the main solutions for using blockchain are database reform, the use of the blockchain concept in the distribution of social assistance, and collaboration with fintech. The conclusion is that the most basic root of this problem is the data, so it is necessary to reform the database that can minimize errors of government targets.

Keywords: Covid-19; Blockchain; Social Assistance; Data

SOLUTIONS FOR UTILIZING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO OVERCOME PROBLEMS DISTRIBUTION OF COVID-19 SOCIAL ASSISTANCE FUNDS

ABSTRAK

Situasi yang mengancam Indonesia saat ini disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19. Setiap harinya kasus aktif terus meningkat dan membuat Indonesia mengalami efek domino. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dan lain-lain. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat oleh pemerintah memunculkan masalah baru yaitu meningkatnya angka pengangguran dan muncul kelompok masyarakat miskin baru. Atas hal tersebut pemerintah berusaha mengoptimalkan pemberian dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu dengan memanfaatkan teknologi blockchain diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran dana bantuan sosial Covid-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian terdahulu. Hasil dalam penelitian ini solusi utama dalam pemanfaatan blockchain adalah reformasi basis data, penggunaan konsep blockchain dalam alur distribusi bantuan sosial dan kerjasama dengan fintech. Kesimpulannya adalah akar permasalahan yang paling mendasar adalah data sehingga perlu dilakukan reformasi basis data yang dapat meminimalisir kesalahan target pemerintah.

Kata Kunci: Covid-19; Blockchain; Social Assistance; Data

PENDAHULUAN

Munculnya wabah coronavirus (Covid-19) pertama kali pada tahun 2019 dan mulai menyebar di Indonesia pada Maret 2020. Hingga saat ini terus berkembang ke setiap daerah dan menyerang

kesehatan masyarakat seluruh dunia. Informasi yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per tanggal 3 Agustus 2021 yang ditampilkan pada Grafik 1, menyatakan sebanyak 33.900 kasus terkonfirmasi, sebanyak 31.324 yang sembuh dan 1.598 meninggal akibat Covid-19.



Grafik 1. Perkembangan Kasus Per-Hari Covid-19 di Indonesia per Tanggal 3 Agustus 2021

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 2021

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan kebijakan dalam mengatasi permasalahan akibat Covid-19 seperti mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berlaku sejak 31 Maret 2020 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhitung mulai 3 Juli 2021 dengan masa perpanjangan saat ini berlaku hingga 9 Agustus

2021. Dampak yang diberikan akibat adanya Covid-19 ini merambah ke berbagai sektor seperti sektor sosial dan ekonomi sehingga kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PSBB dan PPKM dianggap memperlambat laju ekonomi karena menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Grafik 2 menggambarkan hasil aktivitas pengusaha mikro saat pemberlakuan PPKM pada bulan Juli.

Grafik 2. Penilaian Responden Terhadap Beberapa Aspek Kegiatan Saat PPKM Darurat dibandingkan sebelum PPKM Darurat



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain membuat kebijakan yang bersifat membatasi aktivitas masyarakat pemerintah Indonesia juga telah menetapkan beberapa aturan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Kebijakan untuk membagikan bantuan sosial termasuk ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum pemerintah untuk menetapkan kebijakan *dan extraordinary policy* untuk menghadapi dampak dari pandemi Covid-19. Disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RU Said Abdullah (2020) bahwa landasan hukum tersebut akan diimplementasikan bersamaan dengan empat hal yang mencakup penanggulangan dampak Covid-19, penyesuaian terhadap sistem keuangan, intensitas ekonomi untuk UMKM dan koperasi serta bantuan sosial.

Bantuan yang bersifat sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan masyarakat tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya ke tingkat yang wajar atau tidak miskin adalah definisi Bantuan Sosial menurut Kementerian Sosial (2011). Penyaluran program bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18 Tahun 2020. Alur distribusi ini melibatkan para pelaksana yang

meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II Direktorat Jenderal

Penanganan Fakir Miskin yang menangani Bantuan Sosial Tunai, Bank Penyalur dan Pos Penyalur. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia pun mengubah Keputusan Nomor 54 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Covid-19. Keputusan tersebut memuat perubahan sumber data penerima dan sumber usulan data keluarga penerima bansos. Penyaluran distribusi dana bantuan sosial ini melibatkan banyak sekali tangan pemerintah perihal dalam memberikan usulan data penerima bansos.

Data yang tidak akurat adalah penyebab masyarakat terdampak Covid-19 masih ada yang belum menerima bansos Covid-19 (TTI dan ICW 2021). Dalam studinya Dharmakarja (2017) menunjukkan lemahnya pemetaan, pengertian dan metodologi pemerintah untuk menetapkan target penerima bansos. Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam Artikel yang berjudul Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia oleh Noni Noerkaiser (2021) adanya permasalahan yang paling sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran dalam pemberian dana bansos untuk penanganan Covid-19 yang disebabkan oleh data. Bergantung pada penginputan data pengolahan yang dilakukan

oleh pemerintah permasalahan tersebut membuat pemerintah secara konsisten mengevaluasi strategi atas metode penyaluran dana bantuan sosial untuk penanganan Covid-19.

Atas permasalahan data yang tidak akurat dalam penyaluran program dana bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 maka menyebabkan adanya potensi korupsi pada dana bantuan sosial. Dugaan ini berasal dari salah satu alasan bahwa sebanyak 118 masyarakat melaporkan keluhan lewat aplikasi JAGA yang diterbitkan oleh KPK terkait penyaluran dana bansos. Adanya Klasifikasi lima titik persoalan oleh Ombudsman RI dalam menerima laporan dari masyarakat yaitu: (1) tidak meratanya penyaluran bantuan kepada masyarakat di wilayah sasaran; (2) tidak terdaftarnya masyarakat yang lebih darurat kondisinya; (3) tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar; (4) KTP bukan dari wilayah sasaran; dan (5) kurangnya sosialisasi sarana pengaduan kepada masyarakat sebagai penerima bansos (Harahap, 2020). Akhir tahun 2020 terungkap mantan menteri sosial Juliari Batubara korupsi bansos Covid-19 yang terjadi akibat kurangnya pengawasan internal di pemerintah. Ahmad Alamsyah Saragih sebagai anggota Ombudsman RI berpendapat pemerintah terkadang melewati proses evaluasi dan whistleblower system dengan menyarankan pendekatan digital utamanya teknologi blockchain sejak awal untuk pendistribusian program bantuan sosial covid-19.

Teknologi blockchain memperlihatkan potensi revolusi dalam praktik akuntansi agar lebih efisien dan *real time* (EY, 2020). Blockchain memiliki lima kata kunci dasar yaitu desentralisasi, transmisi peer-to-peer, transparansi melalui enkripsi, permanen dan berbasis pemrograman digital (Lansiti dan Lakhani, 2017). Sudah banyak negara-negara lain yang mengimplementasikan teknologi blockchain untuk solusi dari permasalahan berbagai sektor yang ada. Korea Selatan menerapkan teknologi blockchain dalam pengembangan infrastrukturnya yang membangun pembangkit listrik virtual berbasis cloud sehingga berbagai sumber daya energi terintegrasi dan optimal. Di Swiss dan Jepang teknologi blockchain sendiri fokus digunakan untuk mengatur produk medis dan program pengolahannya. Di Indonesia sendiri masih banyak perspektif negatif terkait blockchain akibat berita penyalahgunaan Bitcoin yang dilakukan untuk transaksi ilegal (Mutmainah, 2018, NDY, 2018, Pebrianto dan Suseno, 2018). Selain itu juga beberapa tantangan belum maksimalnya implementasi teknologi blockchain di Indonesia ini menyangkut beberapa aspek seperti SDM, teknis, dan tata kelola.

Berlandaskan pada sumber-sumber terkait serta penelitian terdahulu yang menunjukkan penyaluran program dana bantuan sosial memiliki permasalahan utama dan masih terjadi sampai saat

ini dalam implementasi program bantuan dana sosial untuk penanganan Covid-19. Faktor permasalahan yang menjadi penyebab tidak optimalnya penyaluran dana bansos ini berdasarkan uraian diatas adalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, kurangnya pengawasan dan regulasi dan belum memaksimalkan teknologi secara maksimal sehingga adanya permasalahan data. Dalam penelitian sebelumnya belum dijelaskan pemanfaatan pendekatan digital sebagai solusi latar belakang permasalahan tersebut. Maka tujuan penelitian dalam artikel ini dilakukan untuk memberikan solusi melalui pendekatan digital dalam pemanfaatan teknologi blockchain untuk optimalisasi penyaluran program dana bantuan sosial Covid-19.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai objek utama untuk referensi dan sumber yang bersifat analisis pustaka (Hadi, 1995). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dengan cara dibaca, dipahami dan dipelajari melalui literatur, dokumen dan buku-buku (Sugiyono (2012:141). Kumpulan data diperoleh dilakukan dengan mengumpulkan informasi menggunakan media elektronik dari website baik dalam bentuk artikel, berita ataupun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penyaluran bansos sebelum dan saat Covid-19 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Basis Data Kemiskinan

Memiliki komitmen yang tinggi dalam perbaikan penyaluran program bantuan sosial atau saat ini dikenal dengan istilah Government-to-Person (G2P). Penggunaan teknologi yang diharapkan membantu efektivitas penyaluran bantuan sosial sangat dinanti pengimplementasiannya oleh berbagai pihak terutama mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal utama yang dapat pemerintah lakukan adalah reformasi basis data khususnya data kemiskinan Indonesia dengan menggunakan konsep private blockchain. Basis data yang direformasi harus mutakhir dan selaras dengan data Administrasi kependudukan di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian dalam Negeri (Adminduk-Dukcapil). Suharso, sebagai Kepala Bappenas mengutarakan bahwa hal terpenting untuk melaksanakan program perlinsos adalah akurasi data penerima manfaat. Kementerian Sosial Indonesia melakukan usahanya yaitu *New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* dengan memastikan seluruh data yang ada memiliki identitas tunggal dan terkonfirmasi sesuai dengan data kependudukan yang telah ditetapkan melalui Kepmensos No.12/HUK/2021. Fungsi DTKS mengarah pada

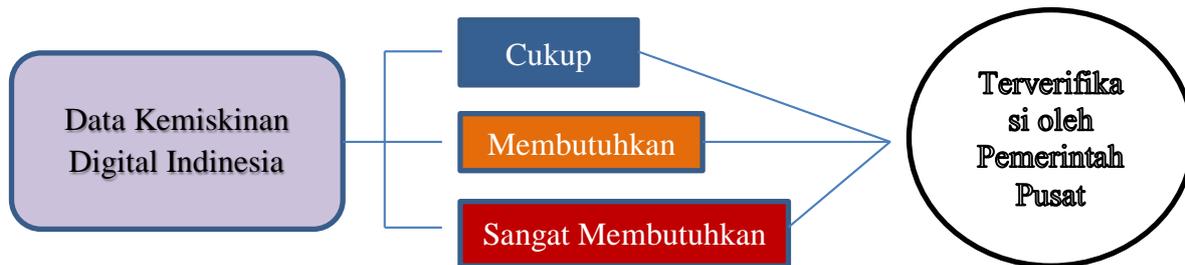
penghimpunan data yang dapat diakses oleh seluruh kementerian (pemerintah pusat).

Penerapan salah satu konsep blockchain pada usaha pemerintah tersebut akan lebih aman karena kontrol sistemnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga pihak lain hanya dapat memantau tanpa bisa menambahkan elemen data lainnya jika tidak diberi akses. Data akan diintegrasikan melalui sistem digital berupa 'block' yang sudah diinput dari data sebelumnya oleh setiap masing-masing pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Permasalahan tumpang tindih pun akan sangat terminimalisir karena setiap block yang sudah diinput dalam sistem ini tidak dapat diubah ataupun terinput secara double karena verifikasi yang dapat dilakukan hanya satu kali oleh setiap individu. Dalam sistem ini setiap individu hanya dapat melihat data pribadinya diri sendiri dan kontrol sistem blockchain private ini hanya dimiliki

oleh pemerintah pusat. Sistem ini akan bersifat transparan namun tetap mengedepankan privasi warga negara Indonesia.

Penggunaan Konsep Blockchain dalam Alur Distribusi Bansos

Masyarakat yang terdaftar dalam sistem data digital tersebut perlu mengkonfirmasi keadaan ekonominya agar pemerintah dapat mengklasifikasikan dengan mudah untuk penyaluran dana bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Untuk proses bisnis yang lebih optimal database yang canggih untuk verifikasi, mengatur distribusi kebutuhan pemerintah menjadi kemampuan yang paling potensial dari blockchain. Block tersebut yang akan menjadi wadah klasifikasi masyarakat dan dari klasifikasi tersebut akan diberikan status bagi masyarakat yang butuh bantuan sosial secara darurat.



Teknologi blockchain dalam digitalisasi G2P akan membantu pemerintah khususnya dalam hal privasi data dan orisinil informasi yang dapat meningkatkan keakuratan laporan transaksi. Dengan pengklasifikasian masyarakat miskin berdasarkan dari data digital yang tersedia seperti ilustrasi diatas tujuan pemerintah dalam mewujudkan prinsip 5T yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administratif akan lebih mudah untuk tercapai.

Bekerjasama dengan Perusahaan Blockchain dan Fintech

Di Tahun 2018 teknologi bantuan kemanusiaan global menjadi rekomendasi yang diajukan oleh salah satu startup blockchain bernama plating. Menggunakan teknologi cryptography yang dapat mengirimkan bantuan dengan aman. Teknologi yang direkomendasikan ini dapat dikontrol oleh smart contract sebagai bentuk pengawasan dan dapat digunakan oleh berbagai jenis smartphone. Dengan plating yang dapat melacak secara real time mengenai bencana yang terjadi dan menyesuaikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini adalah bantuan tunai maka sistem akan mengirim cryptocurrency secara otomatis.

Terhitung sudah mulai sejak 10 tahun sebelumnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memanfaatkan teknologi keuangan dengan

melakukan uji coba untuk menyalurkan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat. Hasil kajian terakhir yang dilakukan TNP2K menyimpulkan bahwa beberapa kelemahan sebelumnya saat program G2P Non Perbankan dan melalui Perbankan dapat teratasi. Segala usaha pemerintah perlu didesain secara kolaboratif, sesuai dengan rencana pemanfaatan teknologi blockchain dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19. Meskipun kebijakan yang berkaitan dengan suatu teknologi tidak dapat disamakan dengan implementasi teknologi pada aspek lainnya namun fleksibilitas pemerintah untuk siap menghadapi segala tantangan pada era ini sangat memerlukan transparansi. Oleh karena itu kerjasama pemerintah dalam pemanfaatan teknologi blockchain dengan fintech untuk optimalisasi penyaluran dana bansos ini dapat mengurangi kekurangan sebelumnya yang tentunya didorong dengan faktor-faktor pendukung.

Faktor lainnya untuk mendukung pemanfaatan teknologi blockchain ini adalah regulasi yang mendukung teknologi blockchain diterapkan oleh pemerintah Indonesia. PP No. 63/207 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai hanya melalui bank, menjadi tantangan pemilik perusahaan fintech yang ingin berkontribusi dan menawarkan kerjasama dalam distribusi bansos untuk penanganan Covid-19.

SIMPULAN

Dari pembahasan artikel fokus utama dalam optimalisasi penyaluran dana bansos Covid-19 adalah reformasi basis data karena hal itu sudah menjadi akar permasalahan dari berbagai permasalahan yang ada. Teknologi Blockchain dapat membantu memaksimalkan usaha untuk reformasi basis data tersebut dengan jaminan yang lebih aman, cepat dan tepat. Kemudahan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama meminimalisir kesalahan target penyaluran dana bansos dan beberapa tujuan lainnya yaitu mempercepat transformasi digital di Indonesia, mencegah korupsi, meningkatkan public trust, pengintegrasian data kemiskinan di Indonesia, peningkatan keamanan penyaluran dana bansos dan pengurangan biaya operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Negara, T. A. S., & Nuswardani, N. (2019). Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah Tunggul. *Katalogis*, 154–168.
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi korupsi dana bansos di masa pandemi covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2 (1), 1–22. 2721-6306
- Nazhid, A. R., & Nasution, M. (2021). *Government to Person (G2P) Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia Teknologi Blockchain dan Potensinya Pentingnya Reformasi Data Bagi Reformasi Perlindungan Sosial*. VI.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Ramadhan, H. A., & Putri, D. A. (2018). Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia. *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 1–66. <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>
- 48 Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. Hlm. 61
- NEWS, BBC. (27 Juli 2021). Bansos PPKM darurat dan level 4: Data penerima 'bermasalah', cerita warga: 'Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah'. Diakses pada 3 Agustus 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57746385>